

BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN WONOSOBO

LAPORAN
KEUANGAN

Tahun Anggaran 2023



Jalan Soekarno-Hatta Wonosobo

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pajabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.

Bagian Hukum Setda sebagai SKPD adalah salah satu entitas Pelaporan di bawah Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Bagian Hukum Setda mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan.

Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Bagian Hukum Setda .

Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Wonosobo, Februari 2023
Kepala Bagian Hukum Setda ,

M.NURWAHID, SH

NIP. 19721110 199803 1 013

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	6
III. Laporan Operasional	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	9
BAB. I Pendahuluan	9
BAB.II Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan	13
BAB.III Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan	16
3.1. Laporan Realisasi Anggaran	16
3.2. Neraca	19
3.3. Laporan Operasional	24
3.4. Laporan Perubahan Ekuitas	28
BAB.IV Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan	29
BAB. V Penutup	30
Lampiran-Lampiran	31



Pemerintah Kabupaten Wonosobo
Bagian Hukum Setda

Jl. Soekarno-Hatta n0 4-3 Wonosobo
Telepon : (0286) 321245, Faximile : (0286) 321183

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Unit Bagian Hukum Setda Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari :

- (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- (b) Neraca
- (c) Laporan Operasional (LO)
- (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Wonosobo, Februari 2023
Kepala Bagian Hukum Setda ,

M.NURWAHID, SH
NIP. 19721110 199803 1 013

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Bagian Hukum Setda Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Dalam struktur APBD, Pendapatan Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 tidak dianggarkan, sehingga tidak ada realisasinya.

Realisasi Belanja Bagian Hukum Setda pada TA 2023 adalah sebesar Rp. 576.279.027,00 atau mencapai 90,67 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 597.271.500,00.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp.938.900,00 yang terdiri dari : Aset lancar sebesar (Rp. 938.900,00); Aset Tetap sebesar (Rp. 103.089.350,00) dan Aset lainnya sebesar Rp. 145.750,00

Nilai Ekuitas sebesar (Rp.104.174,00.)

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/(defisit) operasional, surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/(defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.609.652.729,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (609.652.729,00) .

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp.137.547.702 ,00 ditambah (Defisit)-LO sebesar Rp.(609.652.729,00) dan ditambah Dampak Kumulatif sebesar Rp. 0.00 dan kewajiban untuk dikonsolidasi sebesar 0.00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai (Rp. 472.105.027,00).

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Maksud

Laporan Keuangan Bagian Hukum Setda disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Bagian Hukum Setda selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan. Bagian Hukum Setda selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah berstruktur pada suatu periode pelaporan.

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan target pencapaian realisasi keuangan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

b. Tujuan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, dengan :

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber ekonomi;
- menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan;
- menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Tujuan spesifik laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

1.2 Landasan Hukum

Sebagaimana halnya dengan proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD, maka dalam penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018 ini tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal – hal berikut ini apabila belum diungkapkan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, antara lain :

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- 13 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 21 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kab. Wonosobo ;
- 22 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
- 23 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 24 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Wonosobo disusun agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekarang - kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :"

Bab. I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab. II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab. III Penjelasan pos-pos laporan keuangan

3.1. Laporan Realisasi Anggaran

3.1.1. Pendapatan LRA

3.1.2. Belanja LRA

3.2. Neraca

3.2.1. Aset

3.2.2. Kewajiban

3.2.3. Ekuitas

3.3. Laporan Operasional

3.3.1. Pendapatan LO

3.3.2. Beban LO

3.3.3. Surplus / Defisit

3.4. Laporan Perubahan ekuitas

3.4.1. Perubahan ekuitas

Bab. IV Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

Bab. V Penutup

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

2.1.1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023

Selama periode berjalan, Bagian Hukum Setda telah mengadakan revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) dari DPA awal

Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Naik/ (Turun)
Pendapatan			
<i>Pendapatan Asli daerah</i>	-	-	-
<i>Pendapatan Transfer</i>	-	-	-
<i>Lain-Lain Pendaptn. Yang Sah</i>	-	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-	-
Belanja			
<i>Belanja Operasi</i>	597,271,500.00	576,279,027.00	(20,992,473.00)
<i>Belanja Modal</i>	-	-	-
<i>Belanja Tak Terduga</i>	-	-	-
<i>Belanja Transfer</i>	-	-	-
Jumlah Belanja	597,271,500.00	576,279,027.00	(20,992,473.00)
Surplus /Defisit	(597,271,500.00)	(576,279,027.00)	20,992,473.00

Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana tabel dibawah ini:

Ikhtisar Anggaran dan Realisasi TA 2023

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi TA 2023	Lebih/(Kurang) dari Anggaran	%
Pendapatan dan Belanja				
<i>Pendapatan</i>	-	-	-	-
<i>Belanja</i>	597,271,500.00	576,279,027.00	(20,992,473.00)	79,98
Surplus/(Defisit)	(597,271,500.00)	(576,279,027.00)	20,992,473.00	79,98
Pembiayaan				
<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	-	-	-	-
<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	-	-	-	-
Pembiayaan Netto	-	-	-	-
SILPA	(597,271,500.00)	(576,279,027.00)	20,992,473.00	79,98

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dari Tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa :

- 1 Pendapatan Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan, sehingga tidak terdapat realisasinya
- 2 Belanja Tahun Anggaran 2023 dapat terealisasi sebesar Rp.576279.027,00 atau 79.98 % dari anggaran belanja yang telah ditetapkan sebesar Rp. 597.271.500,00
- 3 Surplus/(defisit) anggaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. (576.279.027,00) yang diperoleh dari realisasi pendapatan dikurangi realisasi belanja.
- 4 Pembiayaan Netto untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 tidak ada realisasinya.
- 5 SILPA untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 mencapai sebesar Rp. Rp. (576.279.027,00).

2.1.2. Realisasi TA 2020 Dibandingkan Dengan Realisasi TA 2023

Perbandingan realisasi Tahun Anggaran 2022 dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana pada tabel berikut :

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik/Turun	%
Pendapatan dan Belanja				
<i>Pendapatan</i>	-	-	-	-
<i>Belanja</i>	576,279,027.00	573,977,403.00	2,301,624.00	0.40
Surplus/(Defisit)	(576,279,027.00)	(573,977,403.00)	(2,301,624.00)	0.40
Pembiayaan				
<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	-	-	-	-
<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	-	-	-	-
Pembiayaan Netto	-	-	-	-
SILPA	(576,279,027.00)	(573,977,403.00)	(2,301,624.00)	0.40

- 1 Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 tidak ada
- 2 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 mengalami Kenaikan sebesar 0.40% dari Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023.
- 3 Tidak ada Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2023.
- 4 SILPA Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar 0.40% dibandingkan SILPA Tahun Anggaran 2023.

2.1.3. Hambatan Dan Kendala Yang Dihadapi.

1. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari bagian hukum adalah karena terbatasnya anggaran dan personil dari bagian hukum, dimana dalam struktur organisasi bagian hukum satu kasubag hanya mempunyai satu staf, dimana dalam menangani pelayanan pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya dalam penyusunan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati, dimana dalam proses penyusunan tidak semua berjalan lancar, karena ada juga kendala penyusunan peraturan perundang-undangan yang terjadi, hal ini mengingat bahwa bagian hukum sebagai fungsi legal drafting harus meneliti konten dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk agar peraturan dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan sudah sesuai dengan undang-undangan nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan .
2. Sumber daya manusia yang ada dibanding dengan jumlah pelayanan yang dilakukan sangat tidak seimbang dimana dengan personil sebanyak 8 orang harus melayani semua dinas dan lembaga yang ada di kabupaten wonosobo terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

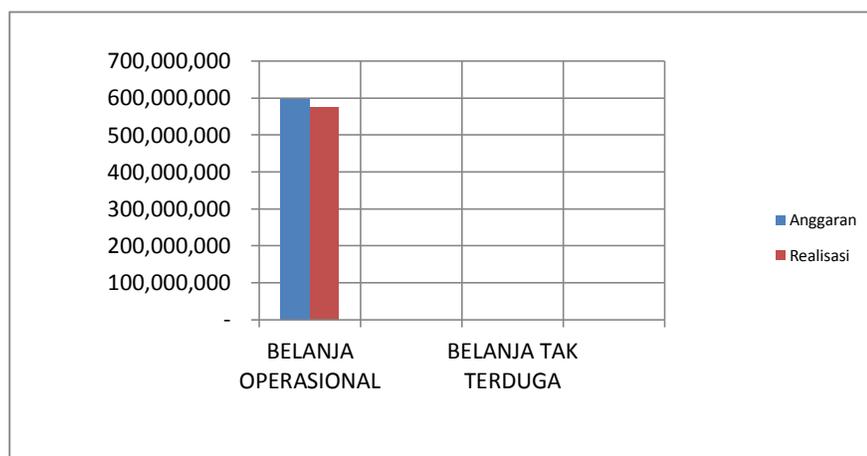
A. Pendapatan-LRA

Nihil

B. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja TA 2023 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Secara garis besar anggaran dan realisasi belanja Bagian Hukum Setda TA 2022 serta realisasi TA 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	+ \ - %
BELANJA OPERASIONAL	597,271,500.00	576,279,027.00	573,977,403.00	3.7
BELANJA MODAL	-	-	-	-
BELANJA TAK TERDUGA	-	-	-	-
TRANSFER	-	-	-	-
Jumlah	597,271,500.00	576,279,027.00	573,977,403.00	3.7

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Realisasi Belanja TA 2023 sebesar Rp. 576,279,027.00 atau mencapai 83,89 % dari anggaran belanja yang telah ditetapkan sebesar Rp. 597,271,500.00 kurang dari anggaran sebesar Rp. 20,992,473.00.

Bila dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami Kenaikan sebesar Rp. atau 3.7 %

Berikut uraian lebih lanjut realisasi belanja Bagian Hukum Setda TA 2021.

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi TA 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp 576.279.027,00 atau mencapai 85.10 % % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 597.271.500,00 kurang dari anggaran sebesar Rp. 20.992.473,00"

Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2022 serta TA 2023 sebagai berikut :

Belanja Operasi	Anggaran	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	+ \-%
<i>Belanja Pegawai</i>	Rp -	Rp -	Rp -	####
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	Rp 597,271,500	Rp 576,279,027	Rp 573,977,403	3.66
<i>Belanja hibah</i>	Rp -	Rp -	Rp -	-
<i>Belanja bantuan sosial</i>	Rp -	Rp -	Rp -	-
Jumlah	Rp 597,271,500	Rp 576,279,027	Rp 573,977,403	3.66

Bila dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja Operasi TA 2023 mengalami Kenaikan sebesar Rp. 2.301.624 atau 3.66 %.

Adapun rincian masing-masing belanja operasi sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Pegawai pada pos Belanja Operasi TA. 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. 0.00 atau 0.00 % dari anggaran sebesar Rp. 0.00 kurang dari anggaran sebesar Rp. 0.00.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	+ \ - %
<i>Honor PNS</i>	-	-	-	-
<i>Honor Lembur</i>	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Bila dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 tidak mengalami Perubahan.

2. Belanja Barang

Belanja barang TA 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp576.279.027,00 atau mencapai 85.10 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 597.271.500,00 atau kurang dari anggaran sebesar Rp. 20.992.473,00.

Bila dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi belanja barang TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.2.301.624 ,00 atau 0.40 % Realisasi belanja barang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Perbandingan Belanja Barang TA 2022 dan 2023

Belanja Barang	Anggaran	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 20202	+ \ - %
<i>Belanja Barang</i>	220,216,310.00	218,525,675.00	573,977,403.00	(61.93)
<i>Belanja Jasa</i>	128,414,080.00	109,984,080.00	-	-
<i>Be;lanja Pemeliharaan</i>	32,500,000.00	32,465,000.00	-	-
<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	216,141,110.00	215,304,272.00	-	-
JUMLAH	597,271,500.00	576,279,027.00	573,977,403.00	0.40

3. Belanja Hibah

Nihil

4. Belanja Bantuan Sosial

Nihil

b. Belanja Modal

Nihil

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3.2. NERACA

Neraca 2020 Per 31 Desember 2023 menunjukkan posisi Aset sebesar Rp. (104.174.000,00) , Kewajiban sebesar Rp. 0,00 dan Ekuitas sebesar Rp.(104.174.000.00) , sebagaimana tabel berikut :

URAIAN	TA 2023	TA 2022	+ \ - %
Aset	Rp 104,174,000	Rp -	103,70
Kewajiban	Rp -	Rp -	-
Ekuitas	Rp 104,174,000	Rp 137,547,702	103,70
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	Rp 104,174,000	Rp 137,547,702	103,70

3.2.1 ASET

Aset Bagian Hukum Setda per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 104.174.000,00 dengan penjelasan masing-masing akun sebagai berikut:

A. ASET LANCAR

Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp. (938.900,00) terdiri atas:

1.	Kas dan setara kas	Rp.	-
2.	Investasi Jangka Pendek	Rp.	-
3.	Piutang lainnya	Rp.	-
4.	Penyisihan Piutang	Rp.	-
5.	Beban di Bayar di Muka	Rp.	-
6.	Persediaan	Rp.	938,900
	JUMLAH	Rp.	938,900

1. Kas dan Setara Kas
Nihil
2. Investasi Jangka Pendek
Nihil
3. Piutang Pendapatan
Nihil
4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Nihil
5. Beban Di Bayar Di Muka
Nihil
6. Persediaan

Nilai Persediaan per 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.938.900,00 dan Rp.876.850,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 62.050,00 .

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo persediaan TA 2023 sebesar Rp. 938.900,00 berasal dari Persediaan Bahan Pakai Habis, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Persediaan

Jenis	TA 2023
ATK	
BINDER CLIP 200	59,400.00
CUTTER KECIL	12,760.00
DOUBLE TAPE	30,250.00
ISI STEPLES BESAR	20,680.00
ISI STEPLER	3,960.00
ISOLASI NACHI	4,400.00
ORDNER	59,400.00
PAPER CLIP NO.5	66,000.00
BENDA POS	
MATRAI 10.000	150,000.00
CETAK	
AMPLOP DINAS	75,000.00
STOPMAP DINAS	99,000.00
KERTAS DAN COVER	
KERTAS HVS 70 GRAM	358,050.00
Jumlah	938,900.00

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

B. INVESTASI JANGKA PANJANG

Nihil

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

C. ASET TETAP DAN AKUMULASI PENYUSUTAN

Aset Tetap per 31 Desember 2023 senilai Rp.103.089.350,00 merupakan aset tetap yang dikelola oleh Bagian hukum mengalami penurunan sebesar Rp. 33.435.752,00 atau (24.49) % dari tahun 2022. Adapun rincian aset tetap selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Rincian Aset Tetap

Aset Tetap	TA 2023	TA 2022	% +/-
<i>Tanah</i>	Rp -	Rp -	-
<i>Peralatan dan Mesin</i>	Rp 452,251,108	Rp 452,251,108	00,00
<i>Gedung dan Bangunan</i>	Rp -	Rp -	-
<i>Jalan, Irigasi dan Jaringan</i>	Rp -	Rp -	-
<i>Aset Tetap Lainnya</i>	Rp 43,973,000	Rp 43,973,000	-
<i>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</i>	#REF!	#REF!	#REF!
Jumlah	#REF!	#REF!	#REF!

Adapun penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap sebagai berikut :

a. Tanah

Nihil

b. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin yang dimiliki Bagian Hukum Setda per 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 452.251.108,00 dan Rp. 452.251.108,00

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal	Koreksi		Mutasi		Saldo Akhir
	2022	D	K	D	K	2023
<i>Peralatan dan Mesin</i>	Rp 452,251,108	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 452,251,108

Penjelasan Mutasi :

1. Alat Angkutan Darat Bermotor

Saldo aset tetap berupa alat angkutan darat bermotor per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.246.614.108,00 tidak ada mutasi selama Tahun 2023.

2. Alat Kantor dan Rumah Tangga

Nilai aset tetap berupa alat kantor per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 59.549.775,00 Tidak ada Penambahan selama tahun 2023.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3. **Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar**
 Nilai aset Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar per 2023 adalah sebesar Rp. 6.462.990,00 mengalami tidak ada Penambahan selama Tahun 2023.
4. **Komputer**
 Nilai aset tetap berupa alat komputer per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 139.624.235,00 tidak ada mutasi selama Tahun 2023.

Dengan mutasi selama tahun 2023 sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal		Koreksi		Mutasi		Saldo Akhir
	2022		D	K	D	K	2023
<i>Komputer</i>	Rp	139,624,235	Rp	-	Rp	-	Rp 139,624,235

Penjelasan mutasi :

- a. **Penambahan Aset**
Nihil
- b. **Pengurangan Aset**
Nihil

5. **Alat Studio**
Nihil

Rincian saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai
1	<i>Alat Angkutan</i>	246,614,108.00
2	<i>Alat kantor dan Rumah Tangga</i>	59,549,775.00
3	<i>Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar</i>	6,462,990.00
4	<i>Komputer</i>	139,624,235.00
Jumlah		452,251,108.00

c. Gedung dan Bangunan

Nihil

d. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Nihil

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 43.973.000,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan dari tahun 2022

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

f. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Nihil

g. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. (393.134.758.00) dan Rp. (359.699.006.00) mengalami penurunan sebesar Rp. (33.435.752.00) atau sebesar 33.57% dari tahun 2022.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Mutasi transaksi terhadap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal	Koreksi		Mutasi		Saldo Akhir
	2022	D	K	D	K	2023
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(359,699,006.00)	-	-	-	-	(393,134,758.00)

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

NO	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	(393,134,758.00)	-	(393,134,758.00)
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi Bangunan	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(393,134,758)	-	(393,134,758)

D. DANA CADANGAN

Nihil

E. ASET LAINNYA

Nilai aset lainnya Bagian Hukum Setda per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 145.750,00 berupa aset lain-lain. Tidak mengalami perubahan dari tahun 2022.

3.2.2 Kewajiban

Nihil

3.2.3 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 104.174.000,00 dan Rp. 137.547.702,00 mengalami penurunan sebesar Rp. (33.373.702,00) dari tahun 2022.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

3.3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan pada Bagian Hukum Setda yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/defisit operasional.

3.3.1 Pendapatan-LO

Nihil

3.3.2. Beban.

Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Adapun realisasi beban Tahun Anggaran 2023 dan tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 609.652.729,00 dan Rp. 613.943.634,00.

Mengalami penurunan sebesar Rp. (4.290.905,00) atau sebesar -0.70% dari tahun 2022.

Rincian Beban Tahun 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022
<i>Beban Pegawai</i>	-	-
<i>Beban Persediaan</i>	218,463,625.00	163,875,950.00
<i>Beban Jasa</i>	109,984,080.00	120,611,996.00
<i>Beban Pemeliharaan</i>	32,465,000.00	32,364,042.00
<i>Beban Perjalanan Dinas</i>	215,304,272.00	256,770,565.00
<i>Beban Bunga</i>	-	-
<i>Beban Subsidi</i>	-	-
<i>Beban Hibah</i>	-	-
<i>Beban Bantuan Sosial</i>	-	-
<i>Beban Penyusutan dan Amortisasi</i>	33,435,752.00	40,321,081.00
<i>Beban Transfer</i>	-	-
<i>Beban Lain-lain</i>	-	-
Jumlah	609,652,729.00	613,943,634.00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

a. **Beban Pegawai**

Nihil

b. **Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan Tahun Anggaran 2023 dan tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 218.463.625,00,- dan Rp. 163.875.950,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan atau diserahkan kepada masyarakat. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut: "

Rincian Beban Persediaan Tahun 2023

Uraian Beban Persediaan	Jumlah
Beban Bahan Pakai Habis	218,463,625.00
<i>Beban Alat Tulis Kantor</i>	13,150,445.00
<i>Beban Kertas dan Cover</i>	6,985,230.00
<i>Beban bahan cetak</i>	78,367,950.00
<i>Beban Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya</i>	1,650,000.00
<i>Beban bahan komputer</i>	1,200,000.00
<i>Beban Alat Listrik</i>	-
<i>Beban Makan dan Minum</i>	117,110,000.00
Jumlah Beban Persediaan	218,463,625.00

c. **Beban Jasa**

Jumlah Beban Jasa Tahun 2023 dan tahun 2022 masing-masing sebesar Rp. 109.984.080,00 dan Rp. 120.611.996,00 mengalami penurunan sebesar Rp. (10.627.916,00) atau sebesar -8.81% dari tahun 2022.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Jasa untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa Tahun 2023

Uraian Beban Jasa	Jumlah
Beban Jasa Kantor	88,840,000.00
<i>Beban Honorarium Narasumber dan Moderator</i>	17,650,000.00
<i>Beban Tenaga Administrasi</i>	27,300,000.00
<i>Beban Jasa Pelaksana Transaksi Keuangan</i>	27,600,000.00
<i>Beban Surat Kabar/Majalah</i>	13,290,000.00
<i>Beban Honorarium</i>	3,000,000.00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Beban Iuran Jaminan/Asuransi	1,144,080.00
<i>Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</i>	1,008,000.00
<i>Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi N</i>	60,480.00
<i>Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN</i>	75,600.00
Beban Jasa Konstruksi Non Kontruksi	20,000,000.00
<i>BebanJasa Khusus</i>	20,000,000.00
Jumlah Beban Jasa	109,984,080.00

d. **Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp32.465.000,00 dan Rp. 32.364.042,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 100.958.00 atau sebesar 0.31% dari tahun 2022.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023

Uraian	Jumlah
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	32,465,000.00
<i>Beban Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor</i>	24,978,000.00
<i>Beban Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya</i>	7,487,000.00

e. **Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 215.304.272.00 dan Rp. 256.770.585.00 mengalami Penurunan sebesar Rp. (41.466.293.00) atau sebesar -16.15% dari tahun 2022.

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023

Uraian	Jumlah
Beban Perjalanan Dinas	215,304,272.00
<i>Beban Perjalanan Dinas Dalam Biasa</i>	195,004,272.00
<i>Beban Perjalanan Dinas Daerah Dalam Kota</i>	20,300,000.00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

f. Beban Bunga

Nihil

g. Beban Subsidi

Nihil

h. Beban Hibah

Nihil

i. Beban Bantuan Sosial

Nihil

j. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan tahun 2022 sebesar Rp.33.435.752,00 dan Rp. 40.321.081,00 mengalami penurunan sebesar Rp.(6.885329,00)

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023

Uraian	Jumlah
<i>Beban penyusutan alat angkut</i>	27,785,571.00
<i>Beban penyusutan alat kantor dan rumah tangga</i>	891,755.00
<i>Beban penyusutan alat Studio, komunikasi dan</i>	1,292,598.00
<i>Beban Penyusutan Komputer</i>	3,465,828.00
Jumlah Beban Penyusutan	33,435,752.00

k. Beban Transfer

Nihil

l. Beban Lain-lain.

Nihil

3.4.3. Kegiatan Non Opeasional

Pada tahun anggaran 2023 Bagian Hukum tidak terdapat surplus/ (defisit) Non Operasional.

3.4.4. Pos Luar Biasa

1. Pendapatan Luar biasa

Pada tahun anggaran 2023 dan tahun 2022 tidak terdapat Pendapatan Luar Biasa

2. Beban Luar biasa

Pada tahun anggaran 2023 dan tahun 2022 tidak terdapat Beban Luar Biasa

3.3.4. Surplus/ (Defisit) LO

Realisasi Defisit -LO Bagian Hukum Setda tahun anggaran 2023 sebesar Rp. (609.652.729,00) Apabila dibandingkan dengan Realisasi Defisit - LO tahun 2022 sebesar Rp. (613.943.634,00 Maka terdapat penurunan sebesar Rp. 4.290.905,00

3.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas Bagian Hukum Setda tahun anggaran 2023 menyajikan informasi mengenai kenaikan dan penurunan ekuitas selama tahun anggaran 2023.

Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 104.174.000.00 berasal dari Saldo Awal Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp.137.547.702,00 ditambah Defisit-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. (609.652.729,00) ditambah kewajiban yang dikonsolidasikan Rp. 0,00 dan dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar Rp. 0.00"

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB V

PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Bagian Hukum Setda merupakan informasi mengenai kemampuan merealisasikan pelaksanaan kegiatan berdasarkan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah ditetapkan.

Laporan keuangan ini menyajikan perbandingan antara anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan dengan realisasinya dalam tahun anggaran 2023 serta realisasi tahun anggaran sebelumnya, posisi kekayaan Bagian Hukum Setda dan kegiatan operasional, perubahan saldo maupun perubahan ekuitas selama 1 periode akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Demikian laporan keuangan ini disusun dengan penjelasan yang memadai sebagai bahan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo tahun anggaran 2023.

Wonosobo, Februari 2023
Kepala Bagian Hukum Setda

M.NURWAHID, SH
NIP. 19721110 199803 1 013

LAMPIRAN